

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PEMENUHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Erni Dwi Ismawati
(1487018)

ABSTRAK

Bank dalam menjalankan operasionalnya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah dengan berupaya untuk memahami betul dan mengenali sebaik mungkin setiap calon nasabahnya, dalam dunia perbankan ini dikenal dengan Penerapan Prinsip Mengenal. Bank membantu pemerintah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada pembukaan rekening calon nasabah penerima Bantuan Pemerintah, pegawai Bank tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* dan tidak melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri atas hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009. Bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami penerapan *prinsip* kehati-hatian oleh bank dalam pembukaan rekening nasabah khususnya penerima dana bantuan pemerintah dan mengkaji pertanggungjawaban bank dalam penerapan *Standar Operasional Prosedur* pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sasaran dari Penerima Bantuan Dana Pemerintah ini termasuk kedalam Badan hukum. Terkait dengan nasabah yang berbentuk badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian dan melakukan tugasnya sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* yang berlaku di dalam bank tersebut. Pegawai Bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan rekening calon nasabah penerima bantuan pemerintah dan tidak melakukan tugasnya sesuai *Standar Operasional Prosedur* akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kata Kunci: prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban, dana bantuan pemerintah

**IMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLE AND BANK RESPONSIBILITY FOR THE
MEETING OF OPERATIONAL STANDARD PROCEDURES OF OPENING PROCEDURES OF ACCOUNTS IN
GOVERNMENT HELP DISTRIBUTION RELATED TO LAW NUMBER 10 YEAR 1998 ON AMENDMENT TO ACT
NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING**

Erni Dwi Ismawati
(1487018)

ABSTRACT

The Banks in running operations must pay attention to the prudential principle. One of the efforts to implement the prudential principle is to strive to understand and recognize as well as possible every prospective customer, in the banking world is known by the Application of Know Your Customer Principles. Banks assist the government in the distribution of government aid funds based on Regulation of the Minister of Finance Decree of the Republic of Indonesia No. 168 / PMK .05 / 2015 About the Mechanism of Budget Implementation of Government Assistance to State Ministries / Institutions. At the opening of of the prospective customer accounts Government Assistance recipients, Bank employees do not perform their duties in accordance with Operational Standard Procedures and do not implement Know Your Customer Principles.

*The method used in this research is a normative juridical with library-based data source. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The Data used by writer is secondary data consisting of primary law that is Law Number 10 Year 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking, Regulation of the Minister of Finance Decree of the Republic of Indonesia Number 173 / PMK.05 / 2016 concerning Amendment to Regulation Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 168 / PMK.05 / 2015 Concerning Mechanism of Budget Implementation of Government Assistance to State Ministries / Institutions, Bank Indonesia Regulation Number 3/10 / PBI / 2001 on Know Your Customer Principles, Indonesia Number 58 / PBI / 2003 on Risk Management as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25 / PBI / 2009. Secondary law materials are literature studies, and tertiary legal materials are legal dictionaries. The research approach includes legislation and conceptual approach. The result of this thesis research is to examine and understand the implementation of prudential principles by banks in opening customer accounts, especially recipients of government aid funds and reviewing bank accountability in the implementation of **Operational Standard Procedures** for opening account of beneficiaries of government funds relative to Law Number 10 Year 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking.*

Based on the Guidelines for Implementation of Know Your Customer Principles, the objectives of this Government Funds Beneficiary are included in the legal entity. With regard to customers in the form of legal entity, to fulfill the obligation of customer identification, the bank needs to verify the deed of establishment and perform its duties in accordance with Operational Standard Procedures applicable within the bank. Bank employees who do not apply prudential principles in the opening of accounts of prospective beneficiaries and do not perform their duties in accordance with Operational Standard Procedures shall be liable to administrative sanctions as stated in Article 52 of Act Number 7 of 1992 concerning Banking.

Keywords: prudential principles, accountability, government aid funds

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II BANK DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUKAAN REKENING NASABAH PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH	
A. Bank sebagai Lembaga Keuangan dan Lembaga Intermediasi .	35
B. Perbankan Pada Umumnya	49
C. Kegiatan Usaha dan Pelayanan Jasa Perbankan	64

D. Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah	69
E. Prosedur Penerimaan Nasabah.....	71

BAB III PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH MELALUI LEMBAGA BANK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Tinjauan Umum Dana Bantuan Pemerintah	76
B. Landasan Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah	77
C. Sasaran dari Bantuan Pemerintah	87
D. Persyaratan Penerima Bantuan	88
E. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Bantuan	90
F. Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank	93

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP BANK DALAM MEMBUKA REKENING NASABAH PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PEMBUKAAN REKENING NASABAH PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH TERKAIT PRINSIP KEHATI-HATIAN

A. Penerapan Prinsip kehati-hatian Oleh Bank Dalam Pembukaan Rekening Nasabah Khususnya Penerima Dana Bantuan Pemerintah	97
B. Pertanggungjawaban Bank dalam Menerapkan SOP Pembukaan Rekening Nasabah Penerima Dana Bantuan Pemerintah dikaitkan dengan Prinsip kehati-hatian	112

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	122
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN

